

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2018-2023**

1. **Nama Unit Organisasi** : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
2. **Tugas** : melaksanakan urusan pemerintah bidang tenaga kerja dan transmigrasi, meliputi pelatihan dan produktivitas, penempatan perluasan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial serta pengawasan ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas perbantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Fungsi** :
 - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - c. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - e. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas pencari kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Bersertifikat	Formulasi Perhitungan: (Jumlah Pencari Kerja Yang Bersertifikat dibagi jumlah pencari kerja terdaftar)x 100% Tipe Perhitungan: Non-kumulatif	Bidang Lattas, BLK PMI, BPK Mandiri, BLK Kompetensi, Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Dinas yang menangani Ketenagakerjaan di Kab./Kota

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
2	Meningkatnya pencari kerja terdaftar yang Bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja	Formulasi Perhitungan: (Jumlah pencari kerja terdaftar yang bekerja dibagi jumlah pencari kerja terdaftar) x100% Tipe Perhitungan: Non-kumulatif	Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BPS Jabar, Dinas yang menangani Ketenagakerjaan di Kab./Kota
3	Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Iklim Ketenagakerjaan baik	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja dengan Perusahaan	Formulasi Perhitungan: {(Jumlah kasus hubungan industrial ke-n – Jumlah kasus hubungan industrial pada tahun ke-n-1) / kasus hubungan industrial pada tahun ke-n-1} X 100% Tipe Perhitungan: Non-kumulatif	Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Dinas yang menangani Ketenagakerjaan di Kab./Kota
4	Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan perundangan di Bidang Ketenagakerjaan	Persentase jumlah perusahaan yang diawasi	Formulasi Perhitungan: Jumlah Perusahaan yang diperiksa dibagi jumlah perusahaan x100% Tipe Perhitungan: Non-kumulatif	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, UPTD. Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I-V, dan BPJS Ketenagakerjaan.
5	Terwujudnya Kerjasama Antar Daerah (KSAD) Bidang Ketransmigrasian yang saling menguntungkan	Persentase realisasi MoU yang dilaksanakan	Formulasi Perhitungan: Jumlah realisasi MoU yang dilaksanakan dibagi jumlah MoU yang dibuat x100% Tipe Perhitungan: Non-kumulatif	Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BLK Mandiri, dan Kementerian PDT dan Transmigrasi RI.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
6	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Formulasi Perhitungan: Rata-rata nilai target indikator program pada sasaran ini Tipe Perhitungan: Non-kumulatif	Sekretariat

Bandung, Desember 2018

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA BARAT,



Dr. Ir. FERRY SOFWAN ARIF, M.Si.
NIP.19621121 198909 1 001